

**OPTIMALISASI “*GENDER EQUALITY POLICY*” TERHADAP  
KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN PADA MASA  
KEPEMIMPINAN MOON JAE IN PADA TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Vika Safitri**

19323253

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**OPTIMALISASI “*GENDER EQUALITY POLICY*” TERHADAP  
KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN PADA MASA  
KEPEMIMPINAN MOON JAE IN PADA TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Vika Safitri**

19323253

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI “GENDER EQUALITY POLICY” TERHADAP  
KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN PADA MASA  
KEPEMIMPINAN MOON JAE IN PADA TAHUN 2017-2021**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

*Masitoh*

*Karina*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 23 Mei 2022*



---

*Vika Safitri*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Cakupan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>12</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	<b>15</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>STRATEGI PENGOPTIMALAN GENDER EQUALITY POLICY</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1 Pengenalan dan Tujuan dari Gender Equality Policy</b> .....	<b>19</b>
<b>2.2 Strategi Implementasi “Gender Equality Policy”</b> .....	<b>22</b>
<b>2.3 Kondisi Kesetaraan Gender Pada Berbagai Aspek</b> .....	<b>24</b>
<b>2.3.1 Ekonomi</b> .....	<b>27</b>
<b>2.3.2 Pendidikan</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3.3 Kesehatan</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3.4 Politik</b> .....	<b>29</b>

<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>FAKTOR PENGHAMBAT KESETARAAN GENDER DAN GLOBAL GENDER GAP REPORT DI KOREA SELATAN PADA TAHUN 2017-2021 .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Keberadaan Budaya Patriarki dan Kapitalisme.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Kesenjangan Sosial Berbasis Gender .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3 Politisasi Isu Kesetaraan Gender .....</b>	<b>38</b>
<b>3.4 Perbandingan South Korea in Global Gender Gap Report 2017 &amp; 2021 .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1. Global Gender Gap Report 2017

Diagram 2. Global Gender Gap Report 2021

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Strategi dari Gender Equality Policy

Tabel 2. Perbandingan Korea Selatan pada tahun 2017 dan 2021 Berdasarkan  
Global Gender Gap Report



## DAFTAR SINGKATAN

DAC	: Development Assistance Committee
GAP	: Gender Equality Policy
KWAU	: Korea Women's Association United
LFPR	: Labor Force Participation Rate
OECD	: Organisation for Economic Cooperation and Development
MOGEF	: Ministry of Gender Equality and Family
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
UN Women	: United Nations Women

## ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis optimalisasi dari kebijakan kesetaraan gender di bawah kepemimpinan Moon Jae-in pada tahun 2017-2021 dan implementasinya, sekaligus sebagai pertimbangan terhadap rencana presiden selanjutnya, Presiden Yoon yang memiliki wacana untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta kebijakannya di Korea Selatan. Kementerian yang memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi masalah terkait perempuan. Dengan menggunakan teori feminisme sosialis. Penelitian ini akan menentukan efektivitas, dampak dan manfaat dari kebijakan. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kontribusi nyata Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai aspek masyarakat. Dengan hasil kajian tersebut, diharapkan Presiden Yoon mempunyai dasar yang kuat untuk memikirkan kembali niatnya untuk menghapuskan kementerian ini nantinya. Upaya ini akan menjamin keberlangsungan upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan mengatasi permasalahan terkait perempuan di Korea Selatan.

Keywords: Korea Selatan, gender, perempuan, feminisme sosialis

## ABSTRACT

*This research will analyze the optimization of the gender equality policy under Moon Jae-in's leadership in 2017-2021 and its implementation, as well as a consideration for the next presidential plan, President Yoon who has a discourse to abolish the Ministry of Gender Equality and Family and its policies in South Korea. Ministries that play an important role in promoting gender equality and addressing issues related to women. By using the theory of socialist feminism. This research will determine the effectiveness, impact and benefits of the policy. The results of this study can provide insight into the real contribution of the Ministry of Gender Equality and Family in achieving gender equality in various aspects of society. With the results of this study, it is hoped that President Yoon will have a strong basis for rethinking his intention to abolish this ministry later. This effort will ensure the continuity of the government's efforts to achieve gender equality and overcome problems related to women in South Korea.*

Keywords: South Korea, gender, women, socialist feminism

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Optimalisasi adalah kata yang berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Dari kata dasar optimal ini jika disisipkan imbuhan juga bisa menghasilkan kata mengoptimal-kan yang artinya menjadikan paling baik, atau paling menguntungkan atau peng-optimalan yang memiliki arti proses, cara, strategi atau perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Sehingga optimalisasi bisa diartikan menjadi cara yang dipilih untuk mencari solusi paling baik atau yang paling menguntungkan.

Presiden Moon Jae-in pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2017, berjanji untuk menjadi "presiden feminis" yang nantinya akan mendukung kebijakan kesetaraan gender dengan terus mempromosikan dan mengawal pelaksanaan dari kebijakan kesetaraan gender. Upaya ini dipilih untuk menjembatani kesenjangan gender yang ada di Korea Selatan, yang juga semakin mendapat perhatian menyusul adanya gerakan #MeToo di Korea Selatan pada tahun 2018, dimana gerakan tersebut membawa aspirasi dalam hidup, berfokus pada pengalaman hidup perempuan di Korea. di era modern, seperti pengelolaan teknologi pengawasan terkini dengan kamera tersembunyi di tempat umum alias molka video, dan meningkatnya frekuensi pembunuhan wanita (Rich et al. 2022).

Kemudian pada 8 Maret 2022 lalu, bertepatan pada perayaan "*International Women's Day*" Presiden Moon Jae-in mengenang salah satu

kebijakan pada pemerintahannya terhadap perempuan, ia juga mengatakan harapan besarnya untuk kemajuan lebih lanjut bagi kesetaraan gender di Korea Selatan di bawah kepemimpinan presiden terpilih selanjutnya setelah dirinya. Ia juga berterima kasih kepada semua orang yang mempraktikkan solidaritas dan kerja sama bagi masyarakat agar setiap orang bisa setara (Kim and Kim 2022).

Kemudian, ia kembali mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah membuat kemajuan besar dalam berbagai hal seperti ekonomi dan lain-lain, Korea Selatan masih memiliki banyak permasalahan yang hadir karena kesenjangan dalam hal kesetaraan gender, dengan struktur dan budaya yang ada hingga menghambat kesetaraan gender bisa tercapai di sana. Presiden Moon juga menyimpulkan bahwa ketika semua orang memahami dan menghormati kehidupan satu sama lain, dunia akan menjadi tempat di mana setiap orang bisa dihormati (Kim and Kim 2022).

Mengenai kebijakan pemerintahannya mengenai kesetaraan gender, Moon Jae In mengatakan bahwa ia telah berupaya untuk membangun sistem yang lebih kuat guna merespon atau menanggapi kekerasan berbasis gender. Presiden Moon juga mengatakan bahwa ketika sebuah negara bisa “menjadi masyarakat yang lebih setara gender”, maka baik itu perempuan dan laki-laki akan mampu dan lebih siap untuk “menghadapi masa depan yang berkelanjutan”. Ia kemudian membahas kembali terkait kebijakan pada pemerintahannya yang berdampak pada perempuan, termasuk salah satunya perubahan kebijakan bagi perempuan dengan memperbarui undang-undang yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap karir perempuan, hingga memberlakukan undang-undang anti-pelecehan dan memperkuat hukuman bagi pelanggar seks digital, dan subsidi penitipan anak bagi

perempuan pekerja. Namun, Presiden Moon mengakui dan sadar betul bahwa pada pemerintahannya, meski telah membuat banyak kemajuan di bidang lainnya, tetapi masih terdapat banyak permasalahan terkait kesenjangan gender di Korea Selatan akibat struktur dan budaya patriarki dan kapitalisme yang menghambat kesetaraan gender, sehingga dapat diibaratkan seperti langit-langit kaca, yang masih ada dimana-mana (Shin 2022).

*The Korea Society* mengutip pada Walby, 1990, yang mengatakan bahwa patriarki didefinisikan pula sebagai suatu struktur sosial yang sudah menjadi sebuah sistem adat dan menjadi sebuah budaya yang meyakini bahwa di mana laki-laki selalu menjadi yang berada di atas sebuah hierarki dan kedudukan sosial, mendominasi, menindas hingga mengeksploitasi perempuan. Di mana, dalam sistem ini hak dan kepentingan seorang perempuan yang menjadi anggota keluarga selalu berada dibawah hak dan kepentingan kepala keluarga yakni seorang laki-laki (The Korea Society, n.d.) .

Namun, setelah akhir masa jabatan dari Presiden Moon Jae in. Dan menjelang pemilihan presiden penggantinya yang akan berlangsung tanggal 9 Maret 2022, reaksi anti-feminis telah meningkat di Korea Selatan, sebuah reaksi yang kini tampaknya telah membantu kandidat Partai Hak Asasi Manusia Yoon Suk-yeol, dari *People Power Party* (PPP)'s mendapatkan kemenangan dan berhasil menjadi Presiden terpilih selanjutnya (Rich et al. 2022).

Tetapi, kebangkitan wacana feminis dengan cepat memicu reaksi balik. Pakar konservatif dan presiden PPP saat ini yakni Lee Jun-seok menggambarkan sikap feminisme yang diusung oleh partai oposisi yaitu Partai Demokrat yang dipimpin Moon memiliki "kecenderungan totaliter" atau anti oposisi dan pihak

berlawanan. Pada tahun 2021, Lee juga menyerukan penghapusan bagi "Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga", dengan alasan bahwa kementerian tersebut terus saja menyebarkan stereotip yang jelek terhadap laki-laki. Survei yang dilakukan oleh Lee juga menunjukkan adanya tren yang berkembang, terutama di kalangan laki-laki muda yang tergolong pada usia kerja produktif, memandang kesetaraan gender yang dipromosikan oleh kementerian tersebut sebagai suatu sikap yang diskriminatif terhadap kaum laki-laki, dan hanya akan menguntungkan pihak perempuan. Misalnya, dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh SisaIN (perusahaan media paling berpengaruh di Korea) pada tahun 2019, menghasilkan perhitungan bahwa laki-laki berusia 20-an tahun merasa lebih mungkin merasakan diskriminasi terhadap laki-laki dua kali lebih parah, dibandingkan dengan diskriminasi terhadap perempuan, yang dengan hasil perolehan survei sebesar 68,8%, sedangkan data dari perempuan yang berusia serupa mendapat hasil sebesar 33,6% (Rich et al. 2022).

Dengan munculnya wacana yang digadang oleh presiden terpilih sebagai pengganti Moon Jae In pada pemilu 2022 lalu, yakni Presiden Yoon Suk-yeol untuk menghapuskan *Ministry Gender Equality and Family* maka secara tidak langsung juga akan mengabaikan kebijakan yang berkaitan dengannya yakni *Gender Equality Policy*. Ditengah banyaknya negara yang masih berjuang untuk mencapai kehidupan yang layak dengan mempersempit kesenjangan gender, Korea Selatan yang notabennya masih belum mencapai titik terbaik dalam hal kesetaraan gender akan sangat disayangkan jika wacana penghapusan ini sampai terjadi. Karena, dengan adanya kementerian dan kebijakan yang dengan tegas ingin berjuang untuk kesetaraan gender saja kesetaraan gender di Korea Selatan masih

sukar tercapai apalagi jika tidak ada badan dan kebijakan khusus yang menaunginya nanti.

*Ministry of Gender Equality and Family* (MOGEF) adalah salah satu Kementrian di Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2001, sebagai salah satu upaya yang dipilih oleh pemerintah Korea Selatan pada saat itu guna meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesetaraan gender dan mempromosikan peran penting perempuan dalam masyarakat. Kementrian ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan anak dan masalah-masalah keluarga. Salah satunya ialah “*Gender Equality Policy*” (Ministry of Gender Equality and Family, n.d.).

Pengembangan dan Implementasi dari "Rencana Kerangka Kerja Kedua Kebijakan Kesetaraan Gender". Yang memiliki latar belakang untuk melaksanakan penyusunan “Rencana Dasar Kebijakan Kesetaraan Gender” yang akan dilakukan setiap lima tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam arti yang lebih praktis dengan mengatasi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki. *Gender Equality Policy* ini memiliki visi untuk menuju sebuah negara demokrasi yang setara dan berkelanjutan maka harus dibangun bersama oleh perempuan dan laki-laki (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).

6 Projek besar menjadi tujuan utama dari keberadaan *Gender Equality Policy* ini, memiliki 22 Strategi yang dipilih untuk mengimplementasikan (Ministry Gender Equality and Family, n.d.), 6 projek besar antara lain:

- 1) Mempromosikan kesadaran dan budaya kesetaraan gender (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).

- 2) Menjamin persamaan hak atas pekerjaan dan kesempatan (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).
- 3) Meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).
- 4) Menciptakan infrastruktur sosial untuk keseimbangan kehidupan kerja (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).
- 5) Menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan kesehatan perempuan (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).
- 6) Memperkuat mekanisme implementasi kebijakan kesetaraan gender (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).

Dari 6 Projek utama yang ingin dicapai oleh keberadaannya *Gender Equality Policy* ini nantinya memiliki 22 Strategi yang dipilih untuk bisa membantu memperkenalkan dan mempromosikan projek-projek yang ada, agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa implementasi “*Gender Equality Policy*” pada masa Moon Jae In pada tahun 2017-2021 tidak optimal?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penghambat “*Gender Equality Policy*” dan kesetaraan gender di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae In pada tahun 2017 sampai 2021.
2. Mengetahui strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In saat masa pemerintahannya guna memastikan “*Gender Equality Policy*” bisa terlaksana dengan optimal.

### **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini memilih Korea Selatan sebagai objek penelitian karena Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mengalami kemajuan secara masif di berbagai bidang, namun masih menghadapi permasalahan mengenai kesetaraan gender (Farnisari dan Sudrajat 2013). Kehadiran “*Gender Equality Policy*” ini tentu saja menjadi titik balik dari kehidupan sosial masyarakat bagi banyak perempuan di Korea Selatan, yang pada akhirnya berdampak pada beberapa aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi hingga budaya, seperti dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang dianggap masih kurang ramah bagi banyak perempuan di Korea Selatan.

Alasan peneliti memilih tahun 2017-2021 ialah karena pada kurun waktu tersebut merupakan masa jabatan oleh Presiden Moon Jae In, yang mana presiden terpilih setelahnya yakni Yoon Suk-Yeol ingin menghapuskan Kementerian

Keluarga dan Kesetaraan Gender serta *Gender Equality Policy* di Korea Selatan (Delhaye 2023).

Sehingga strategi terhadap implementasi atau upaya penerapan dari “*Gender Equality Policy*” bagi kesetaraan gender di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae In pada tahun 2017 sampai 2021 ini menjadi kajian yang perlu diperhatikan karena akan menjadi acuan untuk membahas apakah keputusan Presiden Yoon untuk menghapuskan MOGEF nantinya adalah keputusan yang tepat, mengingat dengan keberadaan MOGEF dan GEP ini saja masih belum bisa mengatasi permasalahan kesetaraan gender di Korea Selatan.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Korea Selatan yang terus mengalami kemajuan diberbagai bidang terus menarik minat banyak pihak untuk terus melihat lebih jauh pada negara ini. Dibalik kemajuan pesat yang dialami oleh Korea Selatan ini, terdapat beberapa permasalahan yang terus saja menghantui Korea Selatan. Salah satunya, tentang isu Kesetaraan Gender di Korea Selatan, yang mana setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Meski, peraturan telah dibuat untuk mengatasi peningkatan permasalahan ini. Ketimpangan gender yang terjadi di Korea Selatan, terjadi di beberapa sektor sosial kehidupan yang pada akhirnya juga berdampak pada perekonomian. Banyak hak-hak perempuan di Korea Selatan yang masih termarjinalkan, dan kesempatan yang terbuka untuk perempuan di Korea Selatan terus menyempit hingga sulit bagi perempuan disana untuk bisa berkompetisi dan sejajar dengan laki-lakinya.

Dalam hal ini, membandingkan dengan literatur terdahulunya yang memiliki kesamaan dalam beberapa aspek yang memiliki keterkaitan.

Lee Young-Joo dan Park Ji-Young pada Jurnal yang berjudul “*Emerging Gender Issues in Korean Online Media: A Temporal Semantic*” telah memaparkan betapa sejak lama permasalahan kesetaran gender di Korea Selatan ini terus meningkat. Kendati peningkatan yang terjadi sejak tahun 1990-an telah melahirkan banyak kebijakan yang mendukung untuk menuntaskan permasalahan kesetaran gender di Korea Selatan (Lee dan Park 2019).

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh penulis dan dibahas dalam Jurnal penelitian ini, yang terjadi pada kurun waktu 2012-2017 yang diambil berdasarkan komentar pada media online. Membuktikan bahwa kesenjangan yang diakibatkan oleh gender di Korea Selatan ini, berimbas di berbagai aspek. Mulai dari sosial hingga ekonomi, adapun kesenjangan gender yang sering terjadi di Korea Selatan berasal dari perbedaan dalam mendapat kesempatan, baik itu berupa posisi ataupun peran, dalam ranah pekerjaan maupun pendidikan. Sehingga, bisa dikatakan bahwa kesempatan perempuan tidak sama besar dengan laki-laki hanya karena faktor perbedaan gender (Lee dan Park 2019)..

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan menggunakan survei praktisi sumber daya manusia (SDM) di organisasi Korea, yang diulas dalam Jurnal berjudul “*Gender equality in Korean firms: recent evidence from HR practitioners*”. Dalam tulisannya, penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang undang-undang kebijakan gender baru-baru ini. Namun, diskriminasi atas dasar perbedaan gender terus saja terus berlanjut di Korea Selatan dengan mengeksplorasi rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam perusahaan Korea,

yang berhubungan juga dengan karakteristik organisasi di Korea Selatan serta Praktik SDM-nya sejak proses rekrutmen, sistem kerja dalam organisasi, hingga perlakuan tidak adil di tempat kerja (Patterson, Bae, and Lim 2012).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengurai bagaimana praktisi SDM mengidentifikasi kemungkinan dari penyebab ketidaksetaraan gender dalam ketenagakerjaan, terlepas dari industri ataupun ukuran perusahaan. Padahal, norma sosial budaya dan praktik SDM di Korea Selatan, terdapat aturan untuk memperlakukan semua orang secara setara (Patterson, Bae, and Lim 2012).

Setelah melihat realita sosial yang terus terjadi di Korea Selatan, meski terdapat upaya dari pemerintah untuk terus mengatasinya. Namun, pada kenyataannya ketidaksetaraan gender di Korea Selatan terus terjadi. Dalam hal ini, selain dari pemerintah Korea Selatan, terdapat juga upaya-upaya yang ditawarkan oleh organisasi internasional setempat seperti Korea Women's Association United, untuk mengatasi permasalahan ini. Yang mana juga dibahas oleh Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida, dalam Jurnal tulisannya yang berjudul "*Upaya Korean Women's Association United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan*". Minimnya kesetaraan gender, khususnya pada bidang politik, membuat Korea Selatan menduduki peringkat ke-107 dari 156 negara dalam hal keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan representasi di parlemen. Hal ini pula yang mendorong penulis untuk mengkaji representasi perempuan pada ruang publik sejalan dengan yang dibawa oleh *Korea Women's Association United* (KWAU), yang juga berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan dalam percaturan politik Korea Selatan (Kumalasari and Rosyida 2022).

Sehingga tujuan dari penulis melakukan penelitian ini ialah untuk memaparkan upaya apa saja yang telah ditempuh oleh KWAU diluar pemerintah pusat, untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan di Korea Selatan yang terus termarjinalkan.

Adapun penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif, serta melakukan pemetaan dasar terhadap konsep masyarakat sipil dan pemberdayaan perempuan. Sehingga, penulis juga memaparkan beberapa upaya yang ditempuh oleh KWAU sesuai dengan peran dan tujuannya. Upaya tersebut antara lain berhadapan langsung dengan parlemen, terlibat dalam lobi politik, ikut serta secara langsung dalam penyusunan undang-undang hingga mengusulkan kebijakan, serta memantau kebijakan dan memantau pihak-pihak yang berkuasa(Kumalasari and Rosyida 2022).

Selain itu, upaya KWAU juga melakukan pendekatan melalui perannya yang juga berbasis sebuah komunitas, seperti menyediakan ruang atau forum publik untuk menyampaikan keinginan dan menyelenggarakan acara yang melibatkan masyarakat luas (Kumalasari and Rosyida 2022).

Adapun sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang praktik dan implementasi dari “*Gender Equality Policy*” dalam peningkatan peran perempuan dan kesejahteraan gender di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In, sehingga pada penelitian ini akan membahas terkait permasalahan tersebut.

Karena pergantian presiden Korea Selatan pada tahun 2022, terus menjadi perbincangan dan selalu mengaitkannya dengan kebijakan dan praktik pada presiden terdahulunya, di mana Presiden terpilih Korea Selatan dianggap tidak

akan memfokuskan dirinya terkait permasalahan kesetaraan gender yang terjadi, di mana ia berjanji akan menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, yang bertugas untuk menetapkan kebijakan terkait gender dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, yang telah berdiri sejak tahun 2001 ini.

Karena menganggap bahwa kementerian ini hanya memperlakukan pria seperti seorang calon penjahat. Dan beliau juga berjanji untuk memberikan hukuman yang sangat berat, bagi mereka yang membuat klaim palsu tentang kekerasan seksual dan menyangkal bahwa sistem politik dan sosial saat ini menguntungkan pria secara tidak adil.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Feminis sosialis memiliki pendapat beragam mengenai patriarki dan kapitalisme, namun beberapa feminis sosialis beranggapan bahwa sejatinya kapitalisme dan patriarki itu adalah hal yang serupa dan tidak ada bedanya (Scholz 2014).

Salah satu feminisme sosialis bernama Heidi Hartmann dalam buku tulisan Scholz yang berjudul "*Feminism: A Beginner's Guide*", mengatakan bahwa patriarki bisa dikatakan sebagai salah satu kondisi yang erat kaitannya dengan material atau sangat berhubungan dengan ekonomi, yang mana nantinya akan menopang upaya kolektif dari laki-laki untuk mendominasi perempuan. Heidi juga menambahkan bahwa pembagian kerja sangat berorientasi dengan gender, yang mana stereotip patriarki dan kapitalisme sama-sama berpendapat bahwa

perempuan memiliki tugas wajib dan mutlak untuk membesarkan anak dan hanya laki-laki lah yang boleh bekerja di ruang publik. Di mana, pemikiran seperti inilah yang akhirnya melanggengkan keterbelakangan dan diskriminasi pada perempuan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, feminisme sosialis dengan tegas menyatakan bahwa salah satu perjuangan untuk melawan patriarki dan kapitalisme adalah dengan tidak membiarkan paham-paham dari patriarki dan kapitalisme ini terus tumbuh dan berkembang (Scholz 2014).

Feminis juga melihat kapitalisme dan patriarki menjadi salah satu penyebab banyaknya eksploitasi yang terjadi kepada perempuan, seperti dalam ekonomi sendiri termasuk pada pekerjaan rumah tangga yang seringkali diperuntukkan hanya untuk kaum perempuan. Dengan kata lain, hal ini juga berkaitan langsung dengan tingkat reproduksi atau kesuburan perempuan. Serta eratnya kaitan dari budaya kapitalisme dan patriarki pada permintaan angkatan kerja perempuan yang tidak dibayar dalam jumlah besar atau sesuai dengan yang seharusnya ia terima, yang akhirnya menciptakan penindasan terhadap perempuan (Scholz 2014).

Adapun terdapat beberapa solusi yang ditawarkan oleh para feminis sosialis, namun mereka di sebuah titik solusi yang sama yakni dengan mengubah atau mengakhiri penyebaran budaya kapitalisme dan patriarki. Pembebasan perempuan dalam jerat patriarki yang melekat erat merupakan sebuah emansipasi yang bagi feminis sosialis juga bisa diartikan sebagai bentuk dari pembebasan kelas sosial, sejarah kelam bagi perempuan hingga peran gender yang masih dirasakan kesenjangannya (Scholz 2014).

Namun lebih dari itu, feminis sosialis terus menekankan bahwa hak setiap individu untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu komunitas yang disini juga berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu asumsi di sini adalah bahwa manusia yang merupakan makhluk yang identitas atau kepribadiannya dipengaruhi oleh komunitas di mana ia tinggal serta keberadaan fisik dan konteks lingkungannya. Klaim metafisik dan epistemologis tentang perempuan harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh ini. Beberapa feminis mengasosiasikan feminisme sosialis dengan “epistemologi perspektif”, cukuplah dikatakan bahwa epistemologi opini adalah teori pengetahuan yang mengklaim bahwa klaim pengetahuan dipengaruhi (atau bahkan ditentukan oleh) pandangan atau status sosial seseorang (Scholz 2014).

Seiring dengan pendapat dari feminis sosialis yang mengatakan bahwa sejatinya sistem dan budaya patriarki dan kapitalisme merupakan akar dari lahirnya masalah-masalah yang terjadi pada ketertindasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan, tak terkecuali di Korea Selatan. Dengan stereotip yang tertanam bahwa perempuan dan laki-laki tidak memiliki kedudukan setara dimana laki-laki merupakan aktor superior di kehidupan bermasyarakat yang akhirnya memposisikan perempuan sebagai aktor inferior yang harus selalu berada dibawah atas dominasi laki-laki.



## **1.7 Argumen Sementara**

Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan negara tentunya memiliki andil besar dalam setiap kebijakan serta keberlangsungan hidup bagi setiap rakyat di negaranya. Hal ini termasuk saat pengambilan keputusan, tentu keputusan mutlak seorang pemimpin negara akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini bisa kita lihat dengan perbedaan dari persepektif dua Presiden terpilih di Korea Selatan terhadap isu yang berkembang di negaranya yakni Korea Selatan. Di mana Presiden Moon menganggap bahwa kesetaraan gender dan keberadaan perempuan pada berbagai bidang kehidupann seperti pada sektor publik, pendidikan, profesi dan pekerjaan yang layak haruslah mencapai kesetaraan tanpa memandang gender, yang mana saat ini masih jauh untuk mencapainya.

Sedangkan pandangan dari presiden Yoon sendiri menganggap bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini sudah mencapai pada titik yang setara, sehingga keberadaan dari kementrian yang mengatur secara khusus terkait kesetaraan gender serta kebijakannya sudah tidak relevan lagi.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai cara mendapatkan informasinya. Menurut Bodgen dan Taylor (1992:21) yang dikutip pada (Nugrani, 2014) , bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang nantinya akan menghasilkan sebuah data deskriptif baik berupa bahasa, tulisan, dan perilaku dari orang lain. Melalui penelitian kualitatif inilah nantinya pada akhirnya akan memungkinkan untuk memperoleh data tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

### **1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menjadikan Korea Selatan sebagai subjek penelitian karena Korea Selatan merupakan salah satu negara yang kental sekali dengan isu-isu tentang kesetaraan gender. Kemudian objek pada penelitian ini ialah “*Gender Equality Policy*” yang berfokus terhadap optimalisasi dan strategi yang digunakan, dengan mengangkat pemikiran dasar dari teori feminisme sosialis.

### **1.8.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan cara membaca dan mengkaji ulang sumber-sumber literatur yang digunakan, seperti buku, jurnal, artikel dan laporan resmi, yang notabennya di akses oleh penulis melalui media online atau internet.

#### **1.8.4. Proses Penelitian**

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan literatur yang memang dirasa tepat untuk membahas terkait isu yang sedang di dikaji oleh peneliti serta isu-isu serupa lainnya.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

#### **- BAB I**

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait latar belakang mengenai isu yang diangkat, serta mengutarakan rumusan masalah hingga tujuan dari penelitian ini. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti juga menyertakan beberapa tinjauan pustaka terkait isu dan bahasan serupa, namun belum menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian kali ini.

#### **- BAB II**

Penulis akan membagi menjadi beberapa sub-bab yang akan menjadi acuan terhadap pembahasan pendukung pada bab III nantinya. Di mana, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengenalan serta tujuan dari GEP serta kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan an politik berdasarkan data yang dirilis oleh World Economic Forum.

#### **- BAB III**

Pada bab ini, penulis akan memberikan data yang akan memperkuat argumen, mengenai faktor penghambat “*Gender Equality Policy*” serta memperkuat argumen yang ada dengan merujuk pada data

yang dirilis oleh *World Economic Forum* yaitu *Global Gender Gap Report* tahun 2017 & 2021.

- BAB IV

Pada bab ini, akan berisikan uraian serta rangkuman yang menjawab dan pembuktian dari argumen sementara yang dibangun oleh peneliti, serta menjawab pertanyaan yang dibangun oleh peneliti.

## BAB II

### STRATEGI PENGOPTIMALAN *GENDER EQUALITY POLICY*

#### 2.1 Pengenalan dan Tujuan dari *Gender Equality Policy*

Moon Jae-in adalah Presiden Korea Selatan yang menjabat sejak Mei 2017. Moon berasal dari Partai Demokrat Korea yang menetapkan diri sebagai partai berhaluan kiri dan telah dengan tegas menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender di Korea Selatan, pemerintahan presiden Moon secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. (Rich et al. 2022).

Dengan demikian pemerintahan presiden Moon bisa dikatakan sangat bersinggungan langsung dengan kebijakan gender equality di Korea Selatan. Pada masa pemerintahan Moon Jae-in, pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ditekankan, dan pemerintah berusaha untuk mendorong inisiatif dan kebijakan yang mendukung tujuan tersebut.

Salah satu contoh yang signifikan adalah pembentukan *Ministry of Gender Equality and Family*, yang diresmikan pada tahun 2001. Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi *gender equality policy* di Korea Selatan.

Tujuan dari kebijakan kesetaraan gender yang bisa juga disebut sebagai sebuah undang-undang ini adalah untuk mendorong kesetaraan gender di semua bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan untuk memfasilitasi kemajuan perempuan dengan mengajukan pertanyaan mendasar mengenai kewajiban, dll. Dimana, pemerintah Korea Selatan membuat undang-undang ini untuk

mewujudkan gagasan kesetaraan gender berdasarkan Konstitusi Korea. (제36편 사회복지 여성발전기본법 /Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan Perempuan Kesejahteraan Sosial, n.d.) .

Adapun konsep di balik undang-undang ini adalah untuk membangun sebuah tempat atau kehidupan yang sehat, di mana tempat ini akan memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat, serta untuk berbagi tanggung jawab secara penuh kepada kedua belah pihak tanpa membedakan gendernya, dengan cara mempromosikan kesetaraan gender. Yang nantinya diharap akan bisa melindungi peran ganda sebagai perempuan dan seorang ibu, hingga meningkatkan dan menghilangkan pemikiran diskriminatif tentang gender, serta mampu untuk memberdayakan perempuan sesuai dengan kemampuan masing-masing (제36편 사회복지 여성발전기본법 /Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan Perempuan Kesejahteraan Sosial, n.d.).

Menurut 제36편 사회복지 여성발전기본법 /Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan Perempuan Kesejahteraan Sosial, beberapa hal penting yang harus diketahui dari Undang-undang ini, adalah sebagai berikut:

- 1) “Kebijakan perempuan” adalah undang-undang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, yang bertujuan untuk memperkenalkan kesetaraan gender, perluasan partisipasi sosial perempuan, hingga peningkatan kesejahteraan perempuan;

- 2) “Perkumpulan perempuan” adalah badan hukum atau organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, yang didirikan dengan tujuan utama mendorong kesetaraan gender, memperluas partisipasi sosial perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan;
- 3) “Fasilitas perempuan” adalah sebuah fasilitas yang dibuat dengan bantuan dari sebuah Keputusan Presiden, yang nantinya fasilitas ini juga berguna untuk meningkatkan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi sosial perempuan, hingga meningkatkan kesejahteraan perempuan;
- 4) Yang dimaksud dengan “Pelecehan seksual terhadap perempuan” adalah saat dimana seorang perempuan, berada di sebuah kondisi di mana pemberi kerja seperti pada sebuah lembaga negara, pemerintah daerah atau organisasi masyarakat yang ditentukan dengan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut lembaga negara, dan sebagainya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu dari hal-hal berikut ini dalam melaksanakan tugas, pekerjaan dan hubungan lainnya:
  - (a) Membuat pihak lain merasakan penghinaan atau kebencian seksual dengan perilaku verbal atau fisik yang bersifat seksual, dll. Dengan memanfaatkan jabatan atau kaitannya dengan tugas; Dan
  - (b) Merugikan pihak perempuan dalam pekerjaan, karena tidak mematuhi perilaku verbal atau fisik apa pun yang bersifat seksual atau tuntutan lainnya, dll;

- 5) Yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah pemilik usaha, penanggung jawab pelaksanaan usaha, atau orang lain yang melaksanakan tugas sehubungan dengan pekerja atas nama pemilik usaha.

## **2.2 Strategi Implementasi “*Gender Equality Policy*”**

**Terdapat isu diskriminasi yang meluas ketika merekrut perempuan untuk mengisi peran gender tradisional yang mengharuskan perempuan untuk tinggal di rumah. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga menghalangi perempuan memasuki pasar tenaga kerja. Para ibu mengalami kesulitan untuk kembali memasuki dunia kerja karena diskriminasi di tempat kerja dan ekspektasi keluarga yang memaksa mereka untuk mengasuh anak dan memikul tanggung jawab keluarga (Zimmermann 2023).**

**Ada banyak contoh perusahaan yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap ibu, seperti menekan perempuan hamil untuk berhenti dari pekerjaannya. Dengan menghapuskan hambatan-hambatan bagi partisipasi ibu dalam dunia kerja secara hukum, diharapkan hal ini akan mendorong perempuan pekerja untuk melihat pernikahan sebagai sebuah tujuan yang berharga. Sebaliknya, harus ada kebijakan yang mendukung perempuan lajang di Korea seperti keringanan pajak, pengembangan karir dan perumahan yang terjangkau untuk mendukung hak perempuan untuk**



memilih menjadi ibu dan istri dan memilih untuk tidak melakukan hal tersebut (Zimmermann 2023).

**Tabel 1. Strategi dari Gender Equality Policy**

No	6 Projek Utama	22 Implementasi Strategi
1	Mempromosikan kesadaran dan budaya kesetaraan gender	1. Memerangi diskriminasi gender di media massa 2. Meningkatkan pendidikan kesetaraan gender di sekolah 3. Mempromosikan budaya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari 4. Meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan mengenai kesetaraan gender
2	Menjamin persamaan hak atas pekerjaan dan kesempatan	1. Mempromosikan kesempatan kerja yang setara 2. Mengatasi diskriminasi gender terkait ketenagakerjaan 3. Meningkatkan status perempuan di pasar tenaga kerja 4. Memberikan dukungan bagi perempuan untuk mempertahankan dan memajukan karir
3	Meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan	1. Meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik dan publik 2. Meningkatkan keterwakilan perempuan di perusahaan swasta 3. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan
4	Menciptakan infrastruktur sosial untuk keseimbangan kehidupan kerja	1. Memperkuat tanggung jawab sosial dalam pemberian perawatan 2. Menjamin hak-hak ibu dan ayah dari orang tua yang bekerja 3. Menumbuhkan budaya ramah keluarga di tempat kerja
5	Menghapuskan kekerasan terhadap	1. Memperkuat kerangka kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan

	perempuan, dan meningkatkan kesehatan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan upaya-upaya untuk memerangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan</li> <li>3. Memberikan perlindungan dan dukungan yang lebih kuat kepada korban kekerasan seksual</li> <li>4. Meningkatkan landasan sistem kesehatan yang responsif gender</li> </ol>
6	Memperkuat mekanisme implementasi kebijakan kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merevisi mekanisme implementasi kebijakan pengarusutamaan gender</li> <li>2. Memperkuat kapasitas kebijakan yang responsif gender</li> <li>3. Membangun dan meningkatkan sistem kerjasama dengan masyarakat sipil</li> <li>4. Mempromosikan kegiatan perdamaian dan unifikasi serta kerja sama internasional</li> </ol>

Sumber: Ministry of Gender Equality and Family (2017)

### 2.3 Kondisi Kesetaraan Gender Pada Berbagai Aspek

Kondisi terkait kesetaraan gender di Korea Selatan dapat kita lihat melalui statistik atau persentase data yang di rilis oleh *World Economic Forum* secara berkala setiap tahunnya, dari banyak negara di dunia.

*The Global Gender Gap Report* ini didasarkan pada tiga konsep. Pertama, persentasi yang lebih berfokus pada pengukuran ketimpangan itu sendiri daripada besarnya. Kedua, persentasi yang menggambarkan ketimpangan sebagai variabel output atau hasil dan bukan ketimpangan variabel input atau akibat. Ketiga, negara diurutkan menurut tingkat kesetaraan gendernya, bukan menurut tingkat pengaruh perempuan (World Economic Forum, n.d.).

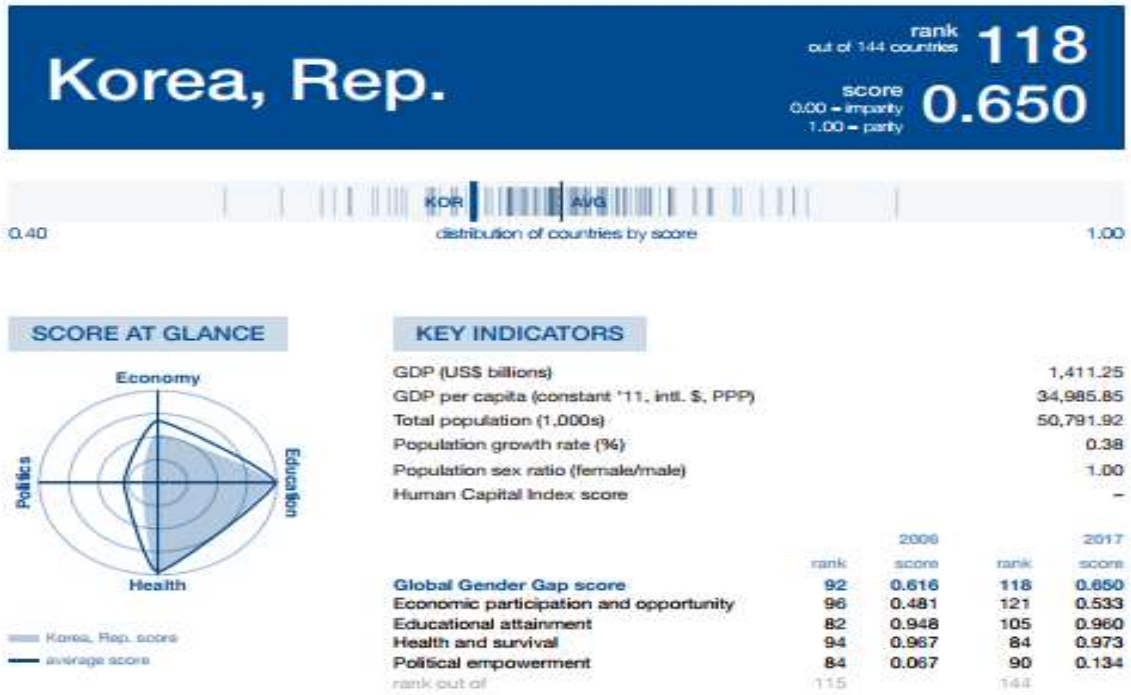
4 kategori mendasar (subindeks) pada *The Global Gender Gap Report* (World Economic Forum, n.d.) adalah:

- (1) Partisipasi dan Peluang Ekonomi (*Economic Participation and Opportunity*);
- (2) Pencapaian Pendidikan (*Educational Attainment*),
- (3) Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (*Health and Survival*); serta
- (4) Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment*).

Berikut data atau persentase dari *Global Gender Gap Report* untuk tahun 2017 yang mana adalah tahun pertama Presiden Moon menjabat sebagai Presiden Korea Selatan pada diagram 1. Dan dilanjutkan dengan membandingkan data atau persentase dari *Global Gender Gap Report* untuk tahun 2021 dimana menjadi tahun akhir perilisan untuk masa kepemimpinan Presiden Moon.

Dengan melihat perbedaan dari data yang tersedia ini, dapat kita ketahui sejauh mana kesetaraan gender pada masa kepemimpinan Presiden Moon bisa berjalan, apakah cukup optimal dengan semua strategi dan proyek utama yang ingin dicapai.

Diagram 1. Global Gender Gap Report 2017



Sumber: World Economic Forum Report (2017)

Diagram 2. Global Gender Gap Report 2021



Sumber: World Economic Forum Report 2021

### 2.3.1 Ekonomi

Dengan mengukur variabel dari, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa, perkiraan pendapatan yang diperoleh, Legislator, pejabat senior dan manajer, Pekerja profesional dan teknis (World Economic Forum, n.d). Menurut data dan statistik dari *Global Gender Gap Report* yang diterbitkan oleh WEF, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan peringkat terendah di dunia dalam hal “Partisipasi dan Peluang Ekonomi”. Peringkat 121 dari 144 negara (World Economic Forum 2017), dan Peringkat 123 dari 156 negara (World Economic Forum 2021). GGGR juga menunjukkan bahwa Korea Selatan berada di peringkat ke-88 dalam hal partisipasi angkatan kerja perempuan dan ke-121 dalam hal kesetaraan upah gender untuk pekerjaan serupa. Rata-rata upah perempuan di Korea Selatan rata-rata 36,7 % lebih rendah dibandingkan rata-rata upah laki-laki (per 2012, perhitungan sendiri berdasarkan database World Klems (2014) (Oyvatt and Onaran 2022, #).

Statistik ini mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam perekonomian yang signifikan di Korea Selatan meskipun faktanya negara tersebut kini diklasifikasikan sebagai negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi. Yeo dan Kim (2020) juga berpendapat terlebih lagi, infrastruktur perawatan yang belum berkembang dan ketergantungan pada tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar menimbulkan tantangan demografi dan keberlanjutan sosial yang serius dalam masyarakat yang menua. Mayoritas pekerjaan perawatan tidak dibayar dilakukan oleh perempuan dalam rumah tangga, sehingga membatasi peluang kerja perempuan dan menyebabkan terganggunya karier mereka (Oyvatt and Onaran 2022, #).

### **2.3.2 Pendidikan**

Dengan mengukur variabel dari, Tingkat melek huruf, Pendaftaran di pendidikan dasar, Pendaftaran di pendidikan menengah dan Pendaftaran di pendidikan tinggi (World Economic Forum, n.d). Tingkat kesetaraan gender di Korea Selatan masih jauh dari kata sempurna.

Terbukti dengan Korea Selatan menempati peringkat ke 105 pada tahun 2017 (World Economic Forum 2017), dan mengalami penurunan peringkat pada tahun 2021 meski score yang diterima mengalami kenaikan sebesar 0,15% dalam kurun waktu 5 tahun (World Economic Forum 2021).

### **2.3.3 Kesehatan**

Korea Selatan saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia, dengan rata-rata perempuan mempunyai kurang dari satu anak. Menurunnya angka kelahiran di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh "Gerakan 4B", di mana B adalah singkatan dari kata dalam bahasa Korea *bihon*, *bichulsan*, *biyeonae*, dan *bisekseu*, yang masing-masing berarti pernikahan dan melahirkan anak, flirting, dan seks. . Gerakan ini bertujuan untuk memerangi budaya patriarki dan misoginis Korea yang berkontribusi terhadap penindasan terhadap perempuan melalui peran gender tradisional terkait dengan hubungan dan peran sebagai ibu. "Mogok Melahirkan" dan "pemogokan pernikahan" semakin populer dalam beberapa tahun terakhir – sebagai antisipasi terhadap penurunan drastis angka kelahiran (Zimmermann 2023).

Beberapa faktor yang melatarbelakangi rendahnya angka kelahiran dan angka kelahiran adalah faktor ekonomi. Hal ini termasuk tingginya biaya pengasuhan anak di Korea Selatan, perumahan yang terjangkau, prospek kerja yang buruk, dan jam kerja yang panjang.

Namun, ada faktor gender lain yang jelas menggarisbawahi peran pengabaian terhadap perempuan dan seksisme dalam masalah rendahnya angka kelahiran. Retorika anti-feminis yang kuat menyalahkan kaum feminis atas rendahnya angka kelahiran, ibu-ibu yang menghadapi diskriminasi di tempat kerja, dan meluasnya kekerasan berbasis gender. Faktor-faktor ini, serta norma-norma gender yang menempatkan sebagian besar beban keluarga pada perempuan, secara efektif menentukan keinginan seorang perempuan untuk memiliki anak. Mereka menekankan peran tradisional gender dengan meminta pertanggungjawaban perempuan atas sebagian besar tantangan dalam melahirkan dan membesarkan anak. Kekerasan berbasis gender juga mempersulit pernikahan dan melahirkan anak. Kekerasan berbasis gender merupakan masalah yang sangat luas sehingga ketika perempuan Korea berusaha mengakhiri suatu hubungan tanpa memicu reaksi kekerasan, mereka menganggapnya sebagai "perpisahan yang aman" (Zimmermann 2023).

#### **2.3.4 Politik**

Salah satu barometer yang menarik kesenjangan gender yang bisa dilihat di sebuah negara ialah melalui keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan, karena hal tersebut mampu menunjukkan seberapa besar kemajuan perempuan

dalam dunia politik. Namun hal tersebut nampaknya belum maksimal dan tidak sesuai dengan sisi legislatif di Korea Selatan itu sendiri.

Jumlah perempuan sebagai anggota parlemen di Korea Selatan yang masih tergolong rendah, dan tentunya hal itu berkaitan dengan perkembangan pembangunan kesetaraan gender di Korea Selatan. Di mana salah satu faktor yang mempengaruhinya merupakan faktor sosial budaya dan sistem rekrutmen partai politik yang tentunya memiliki berperan sangat sentral dalam keberadaan dan keterwakilan perempuan di parlemen dan badan legislatif.

Dalam bukunya "The Politics of Presence", Anne Phillips (1995) berpendapat mengenai teori politik kehadiran, ia berpendapat bahwa politisi perempuan memiliki alasan terbaik untuk mewakili kepentingan kelompoknya. Teori ini juga meyakini bahwasanya representasi deskriptif dan representasi substantif memiliki kaitan yang sangat erat. Dengan kata lain, jika representasi jumlah perempuan di parlemen meningkat, maka kepentingan perempuan di parlemen juga akan menguat. Pendapat Phillips ini, nyatanya berbeda dengan kenyataan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari " (Phillips, 1995).

Kebijakan kuota bagi perempuan di dunia politik yang diusung oleh GEP dan pemerintah diharap mampu untuk setidaknya bisa membawa angin segar bagi upaya peningkatan peran perempuan. Agar perempuan bisa menjadi perwakilan langsung untuk para perempuan lainnya dalam membuat kebijakan yang nantinya bisa memperbaiki permasalahan kesetaraan gender di Korea Selatan.



Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sering kita jumpai meliputi model pengasuhan, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan dalam dunia kerja. Hingga banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan seksual yang disaksikan oleh perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips masih belum bisa memastikan bahwa jumlah yang lebih besar di parlemen akan mengubah agenda politik lebih mempertimbangkan kepentingan perempuan, dia menggunakan ungkapan "*a shot in the dark*" (Phillips, 1995).

Keraguan yang dikemukakan oleh Phillips ini juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh Heiki Hermanns yang mengatakan bahawa rendahnya representasi perempuan di Korea Selatan sendiri tidak mengurangi pertimbangan terhadap kepentingan perempuan. Kesuksesan Korea Selatan dalam merancang program ramah perempuan dapat dilihat pada angka kematian ibu dan anak yang relatif rendah, pencapaian pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, pertumbuhan penduduk yang rendah, dan akses yang sama terhadap perawatan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan (Hermanns, n.d.).

Selain itu, Hermanns juga berpendapat bahwa faktor selain keterwakilan langsung perempuan di parlemen, ada cara lain untuk memenuhi kepentingan perempuan dan anak. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pembangunan perempuan di mana banyak negara masih belum sepenuhnya menganggap bahwa pembangunan serta keterwakilan perempuan di parlemen itu adalah hal yang penting (Hermanns, n.d.).

Konsep kuota bagi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan sendiri, memang telah menjadi salah satu strategi oleh banyak negara di dunia,

dalam misinya untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik parlementer (Krook, 2009).

Sedangkan kondisi politik di Korea Selatan, yang juga dikenal sebagai salah satu negara yang terus mengalami peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia dengan cukup masif ini. Namun, kesetaraan gendernya saat ini berjalan tidak sebanding dengan pembangunan negaranya. Di mana, Korea Selatan berada di urutan 107 dari 156 negara untuk kesetaraan gender yang rendah, terutama di bidang politik di mana keterwakilan perempuan di parlemen masih terbilang jauh tertinggal dari negara maju lainnya (World Economic Forum).

Hal ini pula mendorong keinginan banyak perempuan di Korea Selatan untuk bisa bersaing dengan banyak laki-laki di posisi-posisi krusial pemerintahan dan politik di negaranya ini. Hal ini juga yang menjadi salah satu tujuan dari *Korea Women's Association United* (KWAU), untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender di dunia politik Korea Selatan. Upaya yang telah ditempuhnya antara lain dengan berhadapan langsung di parlemen menjadi wakil dari banyak kepentingan perempuan di Korea Selatan yang masih sering dilupakan, kemudian terlibat dalam lobi politik, hingga ikut serta secara langsung dalam penyusunan undang-undang, serta mengusulkan kebijakan, dan terus memantau kebijakan yang dipilih oleh pihak-pihak yang berkuasa. Selain itu, upaya KWAU juga dilakukan juga melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti menyediakan ruang atau forum publik untuk menyampaikan keinginan dan menyelenggarakan acara yang melibatkan masyarakat luas (Kumalasari and Rosyida 2022).

## **BAB III**

### **FAKTOR PENGHAMBAT KESETARAAN GENDER DAN *GLOBAL GENDER GAP REPORT* DI KOREA SELATAN PADA TAHUN 2017-2021**

#### **3.1 Keberadaan Budaya Patriarki dan Kapitalisme**

Budaya patriarki dan kapitalisme yang kental di Korea Selatan menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial yang pada akhirnya mendorong terjadinya ketertindasan perempuan (Scholz 2014). Misalnya saja, pada keluarga inti yang dikepalai laki-laki, di mana laki-laki memiliki kendali atas hak-hak publik dan stigma sebagai pencari nafkah utama. Sehingga terjadi penguasaan ekonomi secara struktural dalam sebuah keluarga, di mana dengan adanya stigma tersebut pada akhirnya menyebabkan perempuan terpinggirkan dalam kehidupan rumah tangga.

Keberadaan budaya patriarki dan kapitalisme yang masih kental di Korea Selatan ini menciptakan ketidakadilan bagi banyak perempuan. Adapun beberapa contoh umum dari ketidakadilan yang sering dirasakan ialah menerima tindakan diskriminasi yang pada akhirnya perempuan selalu menjadi korbannya, kemudian keberadaan yang selalu termarginalkan, kemudian selalui dihantui dengan stereotype atau beban ganda .

Rendahnya kesetaraan gender dalam perpolitikan Korea Selatan juga disebabkan beberapa faktor, antara lain ideologi patriarki yang masih mendarah daging di masyarakat Korea Selatan. Ideologi tersebut menjadikan terbentuknya tatanan masyarakat di mana laki- laki lebih mendominasi dan superior di segala

bidang daripada perempuan sehingga perempuan ditempatkan pada posisi inferior dan pantasnya untuk selalu dibawah laki-laki (Friscila Atara, 2020).

Tindakan diskriminasi yang dialami oleh banyak perempuan di Korea Selatan sejalan dengan kentalnya kondisi kultural dan struktural yang ada di Korea Selatan, yang tentunya masih melekat dengan budaya patriarki. Hingga keberadaan budaya patriarki ini yang secara tidak langsung juga melakukan diskriminasi dan memisahkan jenis kelamin secara struktural agar laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki, sehingga telah membatasi upaya perempuan dalam meningkatkan partisipasi mereka di ruang publik di Korea Selatan . Pembagian peran dan tugas yang spesifik gender antara pekerjaan luar dan rumah tangga masih mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat di Korea Selatan (ŚLEZIAK, n.d.).

Hal tersebut karena, keberadaan budaya patriarki yang juga dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme hingga mempengaruhi kehidupan serta meninggalkan budaya yang masih bisa terlihat hingga masa modernisasi Korea kini (ŚLEZIAK, n.d.). Hal ini pada akhirnya membuat masalah kesetaraan gender di Korea Selatan sukar untuk direalisasikan secara penuh. Meskipun kemajuan negara membantu mengatasi masalah kesetaraan gender. Struktur biner patriarki menghadapkan perempuan di Korea pada masalah ketidakadilan terkait dengan pembagian tugas rumah tangga dan penindasan secara bebas.

Posisi perempuan yang sering temajinkan dalam kehidupan bermasyarakat misalnya saja saat hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan menjadi terpinggirkan, hal tersebut termasuk kedalam contoh dari marjinalisasi yang sering kaum perempuan hadapi di Korea Selatan. Di mana, seringkali dijumpai kondisi

di mana perempuan ditindas dan terbelakang yang mana menggambarkan marjinalisasi. Kondisi di mana kepentingan perempuan seringkali dikesampingkan hingga dianggap pemiskinan perempuan itu sendiri. Karena kelompok marginal tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Perempuan lebih menderita karena ketidaksetaraan gender daripada laki-laki. Dalam dunia kerja misalnya, ibu atau istri yang bekerja dinilai hanya sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga, sehingga terdapat perbedaan upah yang diterima perempuan dan laki-laki dalam bekerja. Wanita umumnya dibayar lebih rendah daripada pria untuk pekerjaan yang sama.

Feminisme sosialis hadir untuk merestrukturisasi masyarakat guna mencapai kesetaraan gender yang diimpikan, yang mana ketidaksetaraan gender dibuat oleh kapitalis untuk melanggengkan keberadaannya, hingga menciptakan kelas dan pembagian kerja, termasuk di dalam keluarga (Scholz 2014).

Ketidakadilan gender di Korea Selatan juga menempatkan perempuan di posisi yang sulit dalam kehidupan sosial bermasyarakat, contohnya dengan adanya stereotype atau beban ganda yang sering melekat pada perempuan tidak seperti halnya laki-laki, perempuan memiliki peluang lebih tinggi untuk keluar dari sebuah pekerjaan karena munculnya stereotype yang merugikan. Banyak perempuan yang akhirnya akan menderita, terlebih munculnya stigma bahwa mempekerjakan perempuan adalah hal yang merugikan karena memiliki banyak masalah pribadi, seperti mengurus rumah tangga, hamil, melahirkan, mengasuh anak dan menyusui yang nantinya akan menghambat perempuan untuk bekerja secara optimal di tempatnya bekerja. (Frisčila Atara, 2020).

Pada saat yang sama, feminisme sosialis mengatakan bahwa terdapat perbedaan struktur masyarakat inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan hingga terbentuknya stereotype bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

### **3.2 Kesenjangan Sosial Berbasis Gender**

Feminisme sosialis yang melihat bahwa ketidakadilan pada perempuan juga seringkali berhubungan dengan ekonomi, seperti halnya yang sering di jumpai dalam dunia pekerjaan (Scholz 2014). Misalnya ketika perempuan menerima perolehan gaji yang sering tidak seimbang antara perempuan dan laki-laknya meskipun dalam proporsi pekerjaan yang sama, kemudian juga kesenjangan gender dalam promosi jabatan dalam pekerjaan, di mana perempuan selalu mendapatkan tantangannya sendiri untuk bisa mendapat promosi dalam pekerjaan. Di mana perempuan seringkali dipandang sebagai pelayan dalam masyarakat dan laki-laki sebagai orang yang meminta pelayanan dari perempuan.

Kemudian dalam sistem ekonomi, laki-laki membutuhkan orang lain sebagai tawanan, budak, istri dan anak untuk generasi berikutnya, atau sebagai penjaga harta yang dimilikinya. Marx dan Engels, dalam *Theories of Modern Sociology* (Ritzer & Goodman, 2004), menyimpulkan bahwa hanya melalui penghancuran hak milik laki-laki melalui revolusi kelas, perempuan akan memperoleh kebebasan sosial, politik, ekonomi, dan pribadi.

Kemudian, contoh bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan saat melamar pekerjaan dan sudah berada di tempat kerja, ketika muncul pertanyaan serta pertimbangan mengenai kehamilan atau sekadar rencana, karena hal tersebut

dianggap akan mengganggu proses bekerja nantinya hingga penundaan promosi perempuan setelah cuti hamil. Berbagai hambatan budaya dan struktural ini membantu memperkuat ketidaksetaraan gender di dunia pekerjaan di Korea Selatan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk juga di dunia kerja, perempuan seringkali diperlakukan tidak adil karena gaji yang diterimanya jauh lebih rendah daripada laki-laki. Karena anggapan bahwa perempuan bukan seorang pemberi dan pencari nafkah utama dalam keluarga (Friscila Atara, 2020).

Karena di Korea, ketika perempuan pertama kali memasuki dunia kerja, mereka akan cenderung melakukannya dengan baik. Namun, setelah mereka memiliki anak, kebanyakan perempuan meninggalkan pasar tenaga kerja dan profesi mereka sebelumnya.

Kemudian saat mereka siap untuk kembali, mereka akan menemui hambatan disaat peluang yang tersedia akan semakin menyempit dan terbatas hingga upah yang diterima akan semakin rendah, namun dengan tuntutan pekerjaan yang setara dengan upah normal.

Perempuan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai nantinya akan terdaftar dalam database ini hingga kemudian direkomendasikan sebagai kandidat untuk berbagai komite pemerintah atau organisasi publik yang terafiliasi dengan database. Kementerian kemudian berencana untuk mengisi ketersediaan kandidat pada database setidaknya 100.000 posisi menggunakan sistem ini (World Economic Forum 2015).

### 3.3 Politisasi Isu Kesetaraan Gender

Politisasi yang menurut KBBI hal membuat suatu isu atau keadaan menjadi sebuah perbuatan atau gagasan bersifat politis (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seperti halnya isu kesetaraan gender di Korea Selatan sendiri juga memasuki ranah politiknya, sehingga isu kesetaraan gender ini tak jarang di politisi. Dalam hal ini hal tersebut tentunya mengarah pada kehadiran dan represents perempuan dalam ranah politik dan pemerintahannya menjadi hal yang perlu diperhatikan, selain itu perluasan peluang bagi pemimpin perempuan juga menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan gender yang diharapkan (Seo and Hollingsworth, 2022).

Seperti saat dalam kampanye pemilu untuk meraih suara baik dengan cara mendukung atau bahkan kontra terhadapnya. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Moon sebelumnya yang dengan tegas mendukung kesetaraan gender di Korea Selatan, sesuai dengan janji-janji yang disampaikannya saat kampanye dulu. Kemudian hal ini juga terjadi pada tahun 2022, namun dengan gagasan yang berseberangan, kemudian banyak ahli mencatat bahwa kebijakan anti-seks yang digambarkan oleh calon Presiden Yoon saat itu dalam kampanye pemilu 2022 membantunya menang, dengan menargetkan kelompok-kelompok yang juga menginginkan hal serupa .

Dengan mewakili partai konservatif terbesar Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat, Yoon mengklaim kebijakan Presiden terdahulunya yakni Moon Jae in, seperti bias laki-laki dan Yoon juga mengatakan bahwa Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga telah “memperlakukan laki-laki sebagai penjahat (*treated men as potential criminals*)” (McCurry 2022).



### 3.4 Perbandingan *South Korea in Global Gender Gap Report 2017 & 2021*

---

- 4 kategori mendasar (subindeks) pada *The Global Gender Gap Report* adalah
- (1) Partisipasi dan Peluang Ekonomi (*Economic Participation and Opportunity*);
  - (2) Pencapaian Pendidikan (*Educational Attainment*),
  - (3) Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (*Health and Survival*); serta
  - (4) Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment*).

Empat bidang tersebut yang kemudian akan dianalisis bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara anggota yang berasal dari Asia Timur dan Pasifik.

- 1) Partisipasi dan Peluang Ekonomi Kategori atau subindeks yang pertama ini mengandung tiga konsep, yaitu ketimpangan partisipasi, ketimpangan remunerasi, dan ketimpangan kemajuan. Ketimpangan angka partisipasi ini diperkirakan dengan menggunakan perbedaan proporsi partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan upah diperkirakan menggunakan indikator data mentah (rasio perkiraan pendapatan antara perempuan dan laki-laki) dan indikator kualitatif yang diambil dari Survei Opini Eksekutif tahunan Forum (*Executive Opinion Survey*) oleh tahunan oleh *World Economic Forum*, yang meneliti kesenjangan upah yang terjadi dalam dunia pekerjaan juga serupa. Terakhir, kesenjangan gender diidentifikasi dengan menggunakan dua arah, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki di antara para legislator, pegawai negeri senior dan manajer, dan rasio perempuan terhadap laki-laki di antara pekerja teknis dan profesional (World Economic Forum, n.d.).

## 2) Pencapaian Pendidikan

Kategori atau sub-indeks yang digunakan ini mengukur ketidaksetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan saat ini berdasarkan rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat dasar, menengah dan tinggi. Penilaian jangka panjang atas kemampuan suatu negara untuk mendidik jumlah perempuan dan laki-laki yang setara didasarkan pada rasio kemampuan membaca, tulis, dan belajar pada perempuan dan laki-laki (World Economic Forum, n.d.).

## 3) Kesehatan dan Kelangsungan Hidup

Kategori atau sub-indeks ini juga menggunakan dua indikator untuk memberikan gambaran tentang perbedaan kesehatan antara perempuan dan laki-laki. Indikator pertama adalah menggunakan rasio jenis kelamin kelahiran yang juga didominasi oleh tingginya tingkat kelahiran bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Indikator ini secara khusus bertujuan untuk menggambarkan fenomena "perempuan hilang", yang umum terjadi di negara-negara yang lebih menyukai anak laki-laki. Sebagai indikator tambahan digunakan data perbedaan angka harapan hidup sehat bagi perempuan dan laki-laki. Ukuran ini memberikan perkiraan berapa tahun perempuan dan laki-laki diharapkan mampu hidup dalam kesehatan yang baik, serta menghitung tahun-tahun yang hilang karena mengalami kekerasan, penyakit, malnutrisi, dan faktor terkait lainnya (World Economic Forum, n.d.).

#### 4) Pemberdayaan Politik

Kategori dalam sub-indeks terakhir ini, mengukur ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di tingkat tertinggi dalam pembuatan kebijakan. Ketimpangan ini diukur dengan rasio partisipasi perempuan dan laki-laki pada posisi menteri dan rasio antara perempuan dan laki-laki di posisi parlemen, termasuk juga rasio perbedaan antara jumlah perempuan dan laki-laki yang berada di posisi senior (perdana menteri atau presiden) belakangan ini selama 50 tahun ke belakang. Namun demikian, kategori ini memiliki kelemahan utama yaitu tidak adanya indikator yang menggambarkan perbedaan perempuan dan laki-laki di tingkat pemerintahan lokal atau daerahnya (World Economic Forum, n.d.).

**Tabel 2. Perbandingan Korea Selatan pada tahun 2017 dan 2021**

**Berdasarkan Global Gender Gap Report**

No	2017	2021
1	Menempati peringkat 118 dari 144 negara di seluruh dunia	Pada 2021 mengalami peningkatan sampai pada peringkat 102 dari 156 negara di seluruh dunia
2	Partisipasi ekonomi dan kesempatan, menduduki peringkat ke 121 dari 144 negara seluruh dunia	Dalam kesempatan dan partisipasi ekonomi pada 2021 sendiri mengalami penurunan ke peringkat 123 dari 156, namun mengalami kenaikan score sebanyak 0,2% dari tahun 2017 lalu

No	2017	2021
3	Pencapaian pendidikan, sendiri berada di peringkat ke 105 dari 144 negara lainnya	Pada pencapaian pendidikan di tahun 2021 mengalami kenaikan pada peringkat dan skor, sehingga menduduki posisi 104 dari 156, dengan kenaikan 0,15% dari tahun 2017
4	Kesehatan dan kelangsungan hidup menduduki posisi ke 84 dari 144 negara lainnya	Pada bidang kesehatan dan kelangsungan hidup, mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga berakhir di posisi ke 54 dari 156 negara lainnya
5	Pemberdayaan politik berada di posisi ke 90 dari 144 negara	Di pemberdayaan politik meningkat cukup tinggi hingga ke peringkat 68 dari 156 negara yang ada, dan kenaikan skor sebanyak 45%

Sumber: World Economic Forum Report (2017 & 2021)

*Global Gender Gap Report* diketahui memperhitungkan kedudukan umum perempuan dalam beberapa aspek seperti (i) partisipasi dan peluang ekonomi, (ii) pencapaian pendidikan, (iii) kesehatan, dan (iv) pemberdayaan politik. Selain itu, salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilannya kemajuan ekonomi Korea Selatan adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat karena diiringi dengan tingginya tenaga kerja terdidik. Tingginya angka keberadaan pekerja yang berkualitas dan terdidik inilah yang memperlancar produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi hingga akhirnya mampu melakukan pengembangan kapasitas yang lebih tinggi untuk memfasilitasi adopsi dan inovasi teknologi. Dengan demikian, tenaga kerja

yang murah dan berkualitas menjadi dasar keberhasilan strategi pembangunan Korea yang berorientasi ekspor.

Dari berbagai permasalahan terhadap perempuan tersebut, dapat diketahui bahwa ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang cukup serius dan tergolong sulit untuk diatasi di banyak negara, dan Korea merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan tersebut. Jika dilihat dari posisi ekonomi dan diplomasi yang sangat baik yang mampu dicapai Korea Selatan selama satu dekade ini, sudah sepatutnya negara tersebut memiliki tradisi modern, termasuk pandangan tentang gender, guna mengatasi diskriminasi gender yang meluas. Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi, namun dewasa ini masih dihadapkan pada persoalan kesetaraan gender, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan hampir terjadi di berbagai bidang dan gaya hidup masyarakat negara tersebut, termasuk pendidikan, pekerjaan dan bahkan di bidang politik.

Selama periode industrialisasi dan pembangunan yang pesat, Korea telah membuat langkah besar menuju kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesempatan kerja. Kesenjangan gender telah mendapatkan perhatian, seperti pada tingkat pendaftaran sekolah menengah pertama hingga tingkat universitas. Kemudian hal lainnya juga dapat dilihat dari kehadiran perempuan dalam berbagai profesi elit seperti pada dunia hukum, kedokteran, dan pegawai negeri tingkat tinggi.

Namun, kesenjangan gender yang signifikan masih bisa terlihat dalam partisipasi pasar tenaga kerja. Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), hanya 55% wanita Korea yang berusia

antara 15 hingga 64 tahun yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata sebesar 65% di negara-negara OECD lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau Labor Force Participation Rate (LFPR) perempuan Korea Selatan secara signifikan lebih rendah daripada tingkat partisipasi laki-laki sekitar 77% di pasar tenaga kerja, yang mana telah hampir mendekati angka rata-rata OECD sebesar 79% (Hyunsoo 2021).

LFPR wanita Korea dikatakan sampai memiliki pola berbentuk M sepanjang siklus hidupnya. Hal ini disinyalir bisa terjadi karena adanya gangguan karir setelah menikah atau melahirkan anak, di mana angkanya bisa mengalami penurunan yang drastis di akhir usia 20-an dan awal 30-an. Sehingga semakin banyak wanita Korea yang ingin masuk ke pasar kerja, tetapi dibarengi dengan mengasuh anak yang mana menjadi kendala utama bagi pekerja perempuan berpendidikan tinggi dan cakap yang ingin melanjutkan karir mereka. Banyak perekrut di Korea Selatan mengatakan bahwa wanita muda yang menikah lebih kecil kemungkinannya untuk dipilih dan mendapatkan pekerjaan karena adanya diskriminasi gender tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja masih menjadi masalah serius di Korea Selatan, di mana kelahiran anak seringkali menandakan sebagai akhiri karir dari seseorang perempuan bekerja (Hyunsoo 2021).

Di mana, banyak para Ibu di Korea Selatan tetap memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak, namun lingkungan kerja yang kaku dan kurang fleksibel hingga tidak adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung hal tersebut, seperti pengadaan tempat pengasuhan anak yang terjangkau membuat

mereka sulit menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Sehingga pengadaan lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan untuk terus bekerja bahkan setelah mereka memiliki anak adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu agar hak-hak perempuan di Korea Selatan bisa terpenuhi.

Selain aspek ketidaksetaraan gender dalam perekonomian, terdapat pula kekhawatiran tentang tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan Korea Selatan dalam politik dan pemerintahan. Tercatat hingga tahun 2021, Korea Selatan telah mampu bertengger di peringkat ke-10 negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia (IMF, 2021). Tidak hanya ekonomi, Korea juga menjadi salah satu negara peringkat teratas untuk pembangunan manusia (UNDP, 2020).

Namun, perkembangan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini, tidak berjalan beriringan dengan tingkat kesetaraan gender di negaranya saat ini. Kesetaraan gender sendiri merupakan isu yang cukup serius di Korea Selatan, terutama terkait partisipasi perempuan dalam politik Korea. Dengan kata lain, pemberdayaan dan proporsi perempuan dalam sektor politik Korea sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan cenderung dirugikan karena kurang dapat berpartisipasi langsung dalam dunia politik dan sektor pemerintahan, seperti diantaranya pada badan legislatif, partai politik, lembaga pemerintahan serta bagian saat pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki parlemen Korea pada setiap pemilihan umum Majelis Nasional Republik Korea, di mana pada masa demokratisasi tahun 1985 hingga 1988, perempuan di Korea

tidak hanya mampu mencapai 2,9% kursi di parlemen dari total 276 kursi. Jumlah ini menurun setelah proses demokratisasi di Korea. Dari tahun 1988 hingga 1992, perempuan hanya menempati 2 dari 299 kursi di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa parlemen Korea lebih didominasi laki-laki dengan laki-laki menduduki rata-rata 97,5% kursi di parlemen Korea saat ini.

Pencapaian terbesar perempuan dalam politik Korea Selatan, terjadi pada pemilihan tahun 2012, hal tersebut ketika Park Geun-hye berhasil terpilih menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Korea Selatan. Pencapaian di sisi eksekutif ini penting untuk meningkatkan kualitas politik Korea. Namun, meski demikian nampaknya terjadi ketimpangan legislatif, karena hingga pemilihan umum MPR terakhir yang digelar di masa pandemi Covid-19 pada April 2020 yang lalu, proporsi perempuan di parlemen masih sangat rendah, di mana perempuan hanya mendapatkan 19% kursi di parlemen Korea dari 300 kursi yang tersedia. Ini sebenarnya merupakan angka tertinggi sejak demokratisasi Korea pada tahun 1987, namun masih jauh di bawah rata-rata dunia sebesar 25,58% (IPU, 2020).

Selain itu, persentase perempuan yang menduduki kursi parlemen di Korea Selatan masih jauh dari indikator kesetaraan gender secara umum, di mana perempuan menduduki minimal 30-30 kursi di parlemen 40% (IDEA, 2021).

Emansipasi dan sangat rendahnya proporsi perempuan di parlemen selama ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di ranah politik Korea masih sangat tinggi. Ini menempatkan Korea Selatan menempati urutan ke-102 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender secara keseluruhan di



semua wilayah dan ke-107 dari 156 negara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen pada laporan Global Gender Gap Report.

Untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita, maka salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperbaiki peraturan dan kebijakan yang sebelumnya tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap isu dan permasalahan perempuan. Hal itu dilakukan agar regulasi tidak lagi bersifat bias gender. Dalam feminisme sosialis sendiri telah mengatakan terkait nilai-nilai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan tidak adanya salah satu pihak yang lebih tinggi dari yang lainnya. Untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, feminis sosialis sendiri mendukung adanya perubahan yang signifikan terhadap budaya dan sistem patriarki struktural dan kapitalisme yang mengakar, dan mencoba mengintegrasikan peran perempuan ke dalam struktur yang ada. Di mana, dalam struktur ini nantinya perempuan akan mendapatkan hak-hak dan kesempatan yang layak sama halnya dengan yang diperoleh oleh laki-laki.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Presiden sebagai pemangku jabatan bagi sebuah pemerintahan negara, tentu saja selalu menaruh perhatian bagi banyak pasang mata untuk melihat jejak langkah yang akan dan sedang ditorehkan. Begitupun geliat dari janji kampanye dan realisasi kerja yang ditawarkan oleh Presiden Moon Jae In yang menjadi Presiden Korea Selatan pada periode 2017-2021. Berasal dari Partai Demokrat yang dengan tegas menyatakan mendukung dan ingin membawa untuk mempromosikan nilai-nilai feminisme pada periode pemerintahannya. Berbanding terbalik dengan Presiden terpilih selanjutnya, yakni Yoon Seok-yeol yang berasal dari partai oposisi yakni PPP. Dengan membawa janji kampanye untuk menghilangkan nilai-nilai feminisme karena kaum laki-laki merasa terdiskriminasi (Rich et al. 2022)..

Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, tetapi pencapaiannya memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang sangat besar. Pemberdayaan perempuan memicu pertumbuhan ekonomi, memacu produktivitas dan pertumbuhan. Namun ketidaksetaraan gender tetap tertanam kuat di setiap masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Moon Jae In, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Korea. Kebijakan ini berdampak positif terhadap perubahan

budaya dan sosial yang mendukung kesetaraan gender (Kim and Kim 2022).

Namun, presiden berikutnya, Presiden Yoon, berencana untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta kebijakannya. Dalam mengambil keputusan ini, penting untuk mempertimbangkan efektivitas kebijakan kesetaraan gender yang ada. Mempelajari efektivitas kebijakan ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi Presiden Yoon untuk mempertimbangkan potensi dampak dari pemberhentian kementerian dan kebijakan terkait promosi kesetaraan gender di negaranya.

Pendekatan analitis dengan menggunakan teori feminis sosialis menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya persoalan individual namun juga persoalan struktural terkait pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Keputusan Presiden Yoon untuk menghapuskan kementerian dan kebijakan kesetaraan gender dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, seperti memperburuk kesenjangan gender dan melemahkan upaya kesetaraan gender.

Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji efektivitas kebijakan kesetaraan gender di bawah kepemimpinan Moon Jae In memiliki peran penting sebagai basis bukti. Hal ini dapat membantu Presiden Yoon mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan berwawasan ke depan dalam melindungi kementerian dan kebijakan terkait kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan sosial, dan mendorong kesetaraan gender di Korea.

Selaras dengan pendapat dari feminis sosialis yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengakhiri ketertindasan bagi kaum perempuan di kehidupan bermasyarakat ialah dengan memutus mata rantai nilai-nilai patriarki dan kapitalisme (Scholz 2014). Jadi, makna dan standar kesetaraan yang beragam bagi setiap orang menandakan bahwa sukar menakar apakah kesetaraan itu akan tercapai. Namun, dengan adanya payung hukum dibawah Undang-undang Kesetaraan gender yang diresmikan oleh presiden dan diawasi oleh kementrian khususnya akan memberikan asa untuk menjadikan sebuah nilai atau keinginan untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat di Korea Selatan.

## 1.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini, penulis menyadari akan ditemui kekurangan dan keterbatasan pada karya tulis ini, khususnya keterbatasan bahan penelitian dan lain-lain. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama atau mendekati, maka penulis akan merekomendasikan untuk membahas mengenai presiden terpilih setelah Moon Jae In, yakni Presiden Yoon Suk Yeol yang telah menjadi presiden terpilih Korea Selatan sejak tahun 2022, di mana terdapat kebijakan kontroversial yang dimiliki oleh Presiden Yoon ini, yaitu menginisiasi untuk penghapusan *Ministry of Gender and Family* serta *Gender Equality Policy*. Di mana, akan bisa menjadi komparasi atas keefektifan keberadaannya kebijakan ini dan apakah penghapusan kementerian dan kebijakan tersebut adalah pilihan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Agustina, Baiq N., and Agnes M. Saragi. 2022. "Fenomena Glass Ceiling Sebagai Wujud Budaya Patriarki Di Korea Selatan." *Jurnal - Universitas Jember*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/article/download/30738/11596>
- Choi, J. (2017). Moon Jae-in's Road to Gender Equal Cabinet. Retrieved Dec 23, 2022, from <https://www.koreaexpose.com/moon-jae-in-road-to-gender-equal-cabinet/>
- Choi, Sungjoo & Park, Chun-Oh. (2014). Glass Ceiling in Korean Civil Service: Analyzing Barriers to Women's Career Advancement in the Korean Government. *Public Personnel Management*. 43. 118-139. [https://www.researchgate.net/publication/285942992\\_Glass\\_Ceiling\\_in\\_Korean\\_Civil\\_Service\\_Analyzing\\_Barriers\\_to\\_Women's\\_Career\\_Advancement\\_in\\_the\\_Korean\\_Government](https://www.researchgate.net/publication/285942992_Glass_Ceiling_in_Korean_Civil_Service_Analyzing_Barriers_to_Women's_Career_Advancement_in_the_Korean_Government)
- Corps, P. (2021). Global Issues: Gender Equality and Women's Empowerment. Retrieved Dec 23, 2022, from <https://www.peacecorps.gov/educators/resources/global-issues-gender-equality-and-womens-empowerment/>
- Herlina, Eka, Diah T. Iman, and Maizufri. 2022. "Pendobrakan Marjinalisasi Perempuan Pada Drama Korea Because This Is My First Life (Perspektif Binar Patriarki Helene Cixous) Br." *Jurnal Unimed*. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/download/32627/19090>.
- Hermanns, H. (2006). Women in South Korean Politics: A Long Road to Equality. *PORTAL Journal of Multidisciplinary International Studies*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.5130/portal.v3i2.134>
- Hyunsoo, Yang. 2021. "Gender equality: Korea has come a long way, but there is more work to do." OECD. Accessed 2023. <https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/>.
- Kumalasari, Oktavia W., and Hamdan N. Rosyida. 2022. "UPAYA KOREA WOMEN'S ASSOCIATION UNITED DALAM MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER DI RANAH POLITIK KOREA SELATAN | Kumalasari | Jurnal Ilmiah Muqoddimah." *Jurnal Muqoddimah*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/6172>
- Lee, Young J., and Ji Y. Park. 2019. "Journal of Contemporary Eastern Asia Vol. 18, No. 2: 118-141 Emerging Gender Issues in Korean Online Media: A Temporal Semantic." *KoreaScience..* <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201901435968448.pdf>
- Mun, Soo-Hyun. "‘Femininity without Feminism’: Korea's First Woman President and Her Political Leadership." *Asian Journal of Social Science* 43, no. 3 (2015): 249–72. [https://www.researchgate.net/publication/276080802\\_Femininity\\_without\\_Feminism\\_Korea's\\_First\\_Woman\\_President\\_and\\_Her\\_Political\\_Leadership](https://www.researchgate.net/publication/276080802_Femininity_without_Feminism_Korea's_First_Woman_President_and_Her_Political_Leadership)
- Patterson, Louise, Seong-O Bae, and Jung-Yeon Lim. n.d. "Gender equality in Korean firms: recent evidence from HR practitioners." *Asia Pacific*

- Journal of Human Resources. Accessed Jan 11, 2023. [https://www.researchgate.net/profile/Louise-Patterson-4/publication/236107432\\_Gender\\_equality\\_in\\_Korean\\_firms\\_Recent\\_evidence\\_from\\_HR\\_practitioners/links/5a0d73e9a6fdcc39e9bfe1ef/Gender-equality-in-Korean-firms-Recent-evidence-from-HR-practitioners.pdf?\\_sg](https://www.researchgate.net/profile/Louise-Patterson-4/publication/236107432_Gender_equality_in_Korean_firms_Recent_evidence_from_HR_practitioners/links/5a0d73e9a6fdcc39e9bfe1ef/Gender-equality-in-Korean-firms-Recent-evidence-from-HR-practitioners.pdf?_sg)
- Wardani, Marlina R. 2020. "A. COVER." UMY Repository. <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/35540/A.%20COVER.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kardina, Anisa Marlinda Yurisa. *Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan*, 2021. Accessed 9 November 2022. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/download/1196/651/>

### **Buku**

- Burchill, Scott. 2005. *Theories of International Relations, Third Edition*. N.p.: Palgrave Macmillan. <http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/ReferenceFile/Theories-of-IR.pdf>.
- Jones, N. 2016. *Gender and the Political Opportunities of Democratization in South Korea*. N.p.: Palgrave Macmillan US. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Y2ChCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=korea+gender+policy&ots=xdq8UHv4Ib&sig=fGOK1SLIVgIMJ\\_QJtHOoc\\_-amZQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=korea%20gender%20policy&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Y2ChCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=korea+gender+policy&ots=xdq8UHv4Ib&sig=fGOK1SLIVgIMJ_QJtHOoc_-amZQ&redir_esc=y#v=onepage&q=korea%20gender%20policy&f=false)
- Kim, Jinyoung, Jong-Wha Lee, and Kwanho Shin. "Impact of gender inequality on the Republic of Korea's long-term economic growth: An application of the theoretical model of gender inequality and economic growth." *Asian Development Bank Economics Working Paper Series 473* (2016). <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/179689/ewp-473.pdf>. Accessed 9 November 2022.
- Nugrahani, Farida. 2014. "METODE PENELITIAN KUALITATIF." *lppm univet bantara*. <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>.
- Phillips, Anne, *The Politics of Presence* (Oxford, 1998; online edn, Oxford Academic, 1 Nov. 2003), [https://www.academia.edu/4961050/The\\_Politics\\_of\\_Presence](https://www.academia.edu/4961050/The_Politics_of_Presence).
- Scholz, Sally J. 2014. *Feminism*. N.p.: ONEWorld Publications.

### **Laporan**

- Donor Tracker by SEEK DEVELOPMENT. 2023. "Issue Deep Dive: undefined/undefined." Donor Tracker, April 14, 2023. [https://donortracker.org/donor\\_profiles/south-korea/gender](https://donortracker.org/donor_profiles/south-korea/gender).
- Ministry of Gender Equality and Family. n.d. "History > MOGEF History > About MOGEF > Ministry of Gender Equality and Family." 여성가족부. Accessed August, 2023. [http://www.mogef.go.kr/eng/am/eng\\_am\\_f005.do](http://www.mogef.go.kr/eng/am/eng_am_f005.do).
- Ministry of Gender Equality and Family. n.d. "Gender Equality Policy > Gender Equality > Policy > Ministry of Gender Equality and Family."

- 여성가족부. Accessed February, 2023. [http://www.mogef.go.kr/eng/pc/eng\\_pc\\_f001.do](http://www.mogef.go.kr/eng/pc/eng_pc_f001.do)
- Nations, U. (2021). Gender equality and women’s empowerment – United Nations Sustainable Development. Retrieved Jan 11, 2023 from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. n.d. “Arti kata optimal - Kamus Besar Bahasa Indonesia.” KBBI. Accessed August 25, 2023. <https://kbbi.web.id/optimal>.
- Kim, S., & Kim, K. (2011). Gender Mainstreaming and the institutionalization of the women’s movement in South Korea. *Women’s Studies International Forum*, 34(5), 390–400. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2011.05.004>
- Korean Women's Development Institute. n.d. “The Moon Jae-In Administration Unveiled 100 Policy Tasks (related to women·family).” POLICY RECIPE FOR GENDER EQUALITY. Accessed August, 2023. <http://eng.kwdi.re.kr/inc/download.do?ut=A&upIdx=100745&no=1>.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021. “Gender equality: Korea has come a long way, but there is more work to do.” OECD. <https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/gender-equality-korea-has-come-a-long-way-but-there-is-more-work-to-do-8bb81613/>.
- UN WOMEN. n.d. “Country Fact Sheet.” Country Fact Sheet | UN Women Data Hub. Accessed February 16, 2023. <https://data.unwomen.org/country/republic-of-korea>
- World Economic Forum. 2015. “Q&A: How is South Korea closing the gender gap?” The World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2015/03/qa-how-is-south-korea-closing-the-gender-gap/>.
- World Economic Forum. 2017. “The Global Gender Gap Report 2017.” [www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2017.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf).
- World Economic Forum. 2021. “Global Gender Gap Report 2021.” [www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2021.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf).
- World Economic Forum. n.d. “Reports | World Economic Forum.” The World Economic Forum. Accessed August, 2023. <https://www.weforum.org/reports?query=Global+Gender+Gap+Report>.
- 제36편 사회복지 여성발전기본법 /Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan Perempuan Kesejahteraan Sosial. n.d. “FRAMEWORK ACT ON WOMEN S DEVELOPMENT.” 제36편 사회복지 여성발전기본법 (Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan Perempuan Kesejahteraan Sosial). Accessed August, 2023. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/86777/98445/F-102551376/KOR86777.pdf>.



### **Artikel Daring**

- Eun-byel, Im. 2022. "Gender pay gap widens: research." The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220906000689>.
- FARNISARI, MEGARIA. 2013. "BIAS GENDER DALAM FILM SERI KOREA "SUNGKYUNKWAN SCANDAL" | Paradigma." E-Journal Unesa. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2465>.
- Jung-youn, Lee. 2022. "South Korean women still earn 30% less than men: OECD." The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221205000710>.
- KBS WORLD INDONESIA. 2022. "Presiden Moon : Kondisi Kesetaraan Gender di Korsel Lemah Dibandingkan Perkembangan Negara." KBS WORLD INDONESIA. [https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=i&Seq\\_Code=66049](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=66049).
- Lee, A.-R., & Lee, H.-C. (2013). The Women's Movement in South Korea Revisited. *Asian Affairs: An American Review*, 40(2), 43–66. <https://doi.org/10.1080/00927678.2013.788412>
- McCurry, Justin. 2022. "Outcry as South Korean president tries to scrap gender equality ministry to 'protect' women." The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2022/oct/07/outcry-as-south-korean-president-tries-to-scrap-gender-equality-ministry-to-protect-women>.
- Wuryandari, Ganewati, Athiqah N. Alami, and Mario S. Ramadhan. 2023. "Negara Maju Tapi Kesetaraan Gender Rendah, Ada Apa Dengan Korea Selatan?" Konde.co. <https://www.konde.co/2023/03/negara-maju-tapi-kesetaraan-gender-rendah-ada-apa-dengan-korea-selatan.html/>.
- "Analysis of Changes in Female Education in Korea from an Education - Labor Market Perspective." n.d. Asian Women. Accessed August, 2023. <http://e-asianwomen.org/xml/00936/00936.pdf>.
- Delhaye, Clara. 2023. "President Yoon Suk Yeol's decision to abolish the Ministry of Gender Equality: a reflection of a South Korean society plagued by growing anti-feminism." Institut du Genre en Géopolitique -. <https://igg-geo.org/?p=10776&lang=en>.
- Kim, Eun-young, and Hayeon Kim. 2022. "President Moon: Men's happiness is contingent on that of women : Korea.net : The official website of the Republic of Korea." Korea.net. <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=211571>.
- The Korea Society. n.d. "Patriarchy in Korean Society: Substance and Appearance of Power." Korea Society. Accessed August, 2023. [https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs\\_GeneralReading/GettingtoKnowKorea/GTKK%206%20Boo%20Jin%20Park%20Patriarchy%20In%20Korean%20Society.pdf](https://www.koreasociety.org/images/pdf/KoreanStudies/Monographs_GeneralReading/GettingtoKnowKorea/GTKK%206%20Boo%20Jin%20Park%20Patriarchy%20In%20Korean%20Society.pdf).
- Oyvatt, Cem, and Özlem Onaran. 2022. "The effects of social infrastructure and gender equality on output and employment: The case of South Korea." *World Development* Vol. 158. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105987>..
- Rich, Timothy S., Erika Puhakka, Josie Coyle, and Alexis Mayne. 2022. "Anti-Feminism and South Korea's Presidential Election." The Diplomat. <https://thediplomat.com/2022/03/anti-feminism-and-south-koreas-presidential-election/>.

- Seo, Yoonjung, and Julia Hollingsworth,. 2022. “How feminism became a hot topic in South Korea's presidential election.” CNN. <https://edition.cnn.com/2022/03/08/asia/south-korea-election-young-people-intl-hnk-dst/index.html>.
- Shin, Ji-hye. 2022. “Moon hopes for further progress in gender equality under next administration.” The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220308000606>.
- ŚLEZIAK, TOMASZ. n.d. “The Role of Confucianism in Contemporary South Korean Society.” Biblioteka Nauki. Accessed August, 2023. <https://bibliotekanauki.pl/articles/707562.pdf>.
- Yonhap News Agency. 2017. “Moon's pledges: gender equality.” Yonhap News. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20170508005400315>.
- Zimmermann, Brianna. 2023. “South Korea's 4B Movement Lowers the Birth Rate in a Fight for Gender Equality — THE INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW.” THE INTERNATIONAL AFFAIRS REVIEW. <https://www.iar-gwu.org/blog/iar-web/south-koreas-4b>.